

BAB 3

KOTA TARAKAN

Pertumbuhan dan perkembangan kota di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda menunjukkan karakteristik yang berbeda pula. Perbedaan karakteristik perkembangan kota yang ada biasanya disebabkan antara lain keadaan potensi sumber daya, kondisi geografis dan kebijakan yang diterapkan oleh penguasa suatu wilayah. Gambaran ini setidaknya juga dialami daerah Tarakan dalam sejarah perkembangannya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangannya dari lingkungan pulau terpencil dengan penduduk homogen menjadi sebuah lingkungan kota. Dasar pembentukan kotanya dipengaruhi oleh aktivitas industri pertambangan minyak BPM/Shell sejak akhir abad ke-19 Masehi.

Dalam bab ini sebagaimana telah disinggung sebelumnya pada sistematika penulisan diawali dengan uraian Tarakan berkenaan dengan penduduk yang sekarang, posisi geografis dan keadaan lingkungan satuan pembentuk morfologi Kota Tarakan. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara umum daerah ini sebagai uraian awal hubungannya dengan lingkungan “ruang” terbentuknya identitas masyarakat Kota Tarakan sebagai kota tambang minyak. Penggambaran latar belakang sejarah Kota Tarakan ini dimaksudkan untuk memahami proses pertumbuhan dan perkembangannya melahirkan karakteristik kota sebagai penanda identitas masyarakat yang dilekatkan pada masa lalu.

3.1. Kota Tarakan (Penduduk, Geografi dan Fisiografi)

Kota Tarakan saat ini telah berkembang menjadi sebuah kota kategori “kota sedang” dengan jumlah penduduk kurang lebih 178.000 jiwa. Penduduk tersebut terdiri dari berbagai etnis yang tidak dapat dilepaskan dari hubungan sejarah pertumbuhan dan perkembangan awalnya hingga menjadi sebuah kota seperti sekarang ini. Meskipun Kota Tarakan termasuk kota industri modern dan belum lama dibentuk namun memperlihatkan karakteristik yang berbeda dari kota lainnya di Indonesia. Perkembangannya yang cukup pesat baik aspek fisik kota maupun

pertumbuhan masyarakatnya. Mengisyaratkan pentingnya kehadiran peran museum menjembatani kepentingan masyarakat memahami masa lalu mereka dan lingkungannya untuk kehidupan sekarang.

Secara administratif kota ini telah ditingkatkan menjadi daerah pemerintahan berstatus “kota” pada tahun 1997 menandai pengesahannya secara mandiri sebagai salah satu daerah pemerintah kota di Kalimantan Timur. Secara astronomi Kota Tarakan terletak antara 117°34′ Bujur Barat dan 117°38′ Bujur Timur serta antara 3°19′ Lintang Utara dan 3°20′ Lintang Selatan. Kota Tarakan terdiri atas empat wilayah kecamatan dan 18 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut yakni Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat dan Tarakan Utara.

Kota Tarakan merupakan salah satu wilayah pemerintah daerah yang terletak dibagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Memiliki luas wilayah keseluruhan 657,33 km² terdiri atas 38,2% berupa daratan dan sebanyak 61,8% atau 406,53 km berupa lautan. Hal ini menunjukkan daerah ini memiliki wilayah administratif sebagian besar merupakan perairan laut dengan batas – batas wilayah :

- Bagian Utara berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan dan Laut Sulawesi.
- Sebelah barat berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung.

Tarakan sebagai daerah pulau memperlihatkan kondisi lingkungan fisik yang berfluktuasi. Terdiri dari perbukitan landai hingga terjal, dataran dan rawa pantai. Keseluruhan wilayah daratannya tidak menunjukkan adanya kategori pegunungan dengan kisaran ketinggian daratan Tarakan 0 – 100 meter dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah daratan pesisir pantai ditutupi oleh vegetasi hutan mangrove khususnya di wilayah pantai barat dan pantai timur.

Secara umum wilayah Tarakan dibagi menjadi tiga wilayah satuan morfologi yakni: 1) satuan daratan, umumnya terbentuk oleh endapan pantai dan banjir sungai. Ditandai dengan karakteristik daratan yang relatif datar dengan tingkat elevasi antara 0 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Satuan ini tersusun oleh endapan alluvial pantai dan sungai yang terdiri dari lumpur, pasir, lanau, kerikil dan koral; 2) satuan daratan bergelombang, terbentuk dari formasi Sajau terdiri dari batu pasir, kuarsa, batu lempung batu lanau, batu bara, lignit dan konglomerat. Sebarannya meliputi daerah Tarakan bagian barat, selatan dan timur termasuk daerah perkotaan. Memiliki elevasi rendah antara 10 hingga 25 meter dari permukaan laut; 3) satuan perbukitan, juga terbentuk dari formasi Sajau dengan elevasi 25 – 100 meter dari permukaan laut. Daerah satuan ini menurut hasil inventarisasi geologi lingkungan perkotaan Tarakan (bagian barat, utara, selatan dan sebagian timur) merupakan daerah yang cocok untuk pengembangan/pelebaran kota, permukiman, industri dan perikanan (Heru A. Lestiadi, et. Al, 2005; 3-4).

Memperhatikan letak geografis Tarakan yang berada di garis khatulistiwa mempengaruhi keadaan curah hujan yang terjadi sepanjang tahun. Secara umum daerah ini sebagaimana daerah lainnya di Indonesia yang beriklim tropis, maka pada dasarnya Tarakan juga dipengaruhi oleh dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Hanya saja posisinya tepat berada di garis khatulistiwa menyebabkan curah hujan yang terjadi tidak memperlihatkan perbedaan yang tinggi dari kedua musim tersebut dan selalu terjadi musim peralihan pada bulan – bulan tertentu. Sehingga keadaan seperti ini kadangkala tidak menentu dan terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Timur termasuk di Tarakan. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Secara umum wilayah Tarakan termasuk daerah beriklim panas, dipengaruhi oleh kondisi ketinggian daratan Tarakan dari permukaan laut relatif rendah. Selain itu juga daratannya relatif kecil dan sempit dikelilingi laut menyebabkan pengaruh suhu udaranya tergolong tinggi. Suhu udara Tarakan sepanjang tahun 2006 berkisar antara 24,3°C. Kelembaban udara juga relatif tinggi berkisar antara 63,8 sampai dengan

97,1%. Kelembaban udara terendah hanya mencapai 58% terjadi pada bulan Maret, Agustus dan September. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Januari, Maret dan April dan kelembaban udara rata – rata sepanjang tahun tercatat sebesar 346,2 mm (data statistik Kota Tarakan tahun 2008).

3.2. Sejarah Kota Tarakan.

Latar belakang sejarah Kota Tarakan sebagai kota tambang minyak dalam penulisan ini dibedakan menjadi dua bagian. Pertama Tarakan sebelum adanya aktivitas pertambangan minyak. Masa ini ditandai kondisi awal Pulau Tarakan yang menunjukkan belum adanya aktivitas tambang minyak dan masih menjadi lingkungan pulau terpencil. Kedua Tarakan pada masa pertambangan minyak yang mengantarkan daerah ini mengalami baik perubahan morfologi fisik menjadi kota tambang minyak maupun perubahan sosial masyarakatnya. Perubahan sosial masyarakat membentuk sebuah kehidupan sosial yang dipersatukan oleh kegiatan pertambangan minyak. Kegiatan inilah kemudian menjadi penanda yang merepresentasikan identitas kolektif mereka sebagai masyarakat tambang minyak di masa lalu.

3.2.1 Tarakan Pra Pertambangan Minyak

Sumber tertulis yang menguraikan kondisi lingkungan dan sosial Tarakan sebelum masuknya pengaruh bangsa Belanda, atau sebelum ditemukannya sumber minyak pada abad akhir abad ke-19 Masehi relatif kurang dibanding daerah lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena selain lingkungan kehidupan masyarakat yang pertama kali mendiami pulau ini “Suku Tidung” tidak mengenal aksara lokal, juga daerah ini belum memiliki peranan penting sebagai salah satu tempat yang menghubungkan banyak orang. Dengan kata lain Tarakan belum menjadi suatu daerah yang memiliki sumber daya alam (selain minyak) yang dibutuhkan dunia luar, atau sebagai tempat yang memiliki peran penting dalam dunia perdagangan Internasional. Adrian B. Lopian (2009: 40) menyebutkan bahwa Tarakan pada abad XIX ketika di sini sumber minyak belum ditemukan dan belum menjadi bahan bakar

penting, pusat kegiatan ekonomi adalah Tanjung Selor di tepi Sungai Bulungan yang terletak di seberang Tanjung Palas, Tempat kedudukan Sultan Bulungan.

Akan tetapi bukan berarti Tarakan sama sekali tidak memiliki peran penting dalam jaringan lokal. Setidaknya Tarakan telah menjadi jalur jaringan perdagangan yang menghubungkan kerajaan-kerajaan lokal di sekitarnya. Meskipun bukan sebagai bandar atau pelabuhan penting, setidaknya telah menjadi daerah yang sering disinggahi oleh para pedagang dan nelayan yang melintas disekitarnya. Peran Tarakan sebagai tempat persinggahan nelayan dan pedagang termasuk bajak laut, kemudian oleh masyarakat setempat menghubungkannya dengan asal – usul penamaan Pulau Tarakan sebagai *Pulau Ngakan*. (pulau persinggahan atau pulau tempat makan). Kata *ngakan* dalam bahasa Tidung yang berarti makan. Latar belakang penamaan *Pulau ngakan* ini kemudian berubah menjadi Pulau Tarakan.

Informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat juga menyebutkan bahwa Tarakan pada awalnya merupakan tempat persinggahan para nelayan dan pedagang lokal sebelum meneruskan perjalanannya menuju daerah pedalaman Kalimantan Timur bagian utara. Daerah dimaksud seperti Salimbatu, Tanjung Selor dan Tanjung Palas, Sebuku, Bunyu dan Sesayap. Daerah ini pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Berau termasuk Tarakan hingga awal abad XIX Masehi. Tarakan kemungkinan juga pernah menjadi wilayah di bawah pengawasan Kerajaan Sulu yang berpusat di sebelah utara Kalimantan. Berbagai sumber sering diberitakan kerajaan ini mengakui wilayah perbatasannya di pesisir Timur Kalimantan Timur hingga mencapai Tanjung Mangkalihat yang berada di sebelah selatan Tarakan.

Munculnya perpecahan dalam lingkungan Kerajaan Berau yang dipicu oleh perebutan tahta, menyebabkan beberapa daerah yang disebutkan di atas melepaskan diri dan membentuk kerajaan baru bernama Kerajaan Bulungan. Selanjutnya daerah-daerah dekat lingkungan Istana Berau juga terbentuk menjadi dua kerajaan yakni Kerajaan Sambaliung dan Kerajaan Gunung Tabur. Akibat perpecahan yang dialami Kerajaan Berau tersebut, kemudian melahirkan tiga kekuatan kerajaan baru (Sambaliung, Gunung Tabur dan Bulungan). Nama Kerajaan Berau perlahan tidak muncul lagi akibat terbentuknya tiga kekuasaan lokal baru. Peristiwa ini terjadi kira –

kira sesudah 1837 dan sebelum 1844. Pada tahun 1837, Bulungan masih mengaku sebagai vasal dari Sultan Berau, tetapi pada tahun 1844 Belanda telah mengakui Bulungan sebagai kerajaan yang mandiri (Lapian, 2009: 186). Kerajaan Bulungan memiliki wilayah yang mencakup pulau – pulau sekitarnya seperti Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu dan wilayah bagian utara yang tergabung dalam wilayah Kerajaan Sulu. Lebih lanjut Adrian B. Lapian (2009: 188), menjelaskan keadaan dan posisi perbatasan kedua kerajaan tersebut, bahwa Kerajaan Bulungan di sebelah utara berbatasan dengan Kerajaan Sulu, tetapi tidak ada garis batas yang jelas. Namun yang pasti bahwa pada saat itu penguasa Kerajaan Bulungan telah memungut upeti dari orang-orang Tidung yang bermukim di daerah pesisir. Mereka berkuasa atas Tanah Tidung seperti Sembakung, Sesayap, Sebuku sampai Muara Tawau (Tawao). Kemudian Kerajaan Sulu juga mengakui daerah pantai utara Kalimantan Timur sampai Tanjung Mangkalihat sebagai perbatasan kekuasaannya di bagian selatan.

Keterbatasan data historis yang berhasil dihimpun tentang Tarakan periode awal menyebabkan minimnya informasi yang dapat diuraikan tentang keadaan lingkungan dan demografi Tarakan sebelum aktivitas tambang minyak berjalan. Tidak banyak yang dapat digambarkan khususnya mengenai kisaran populasi masyarakat dan sejak kapan pulau ini mulai dihuni oleh masyarakat Tidung sebagai penduduk awal di Tarakan sebelum kegiatan pertambangan minyak dimulai. Terkait dengan hal ini, ada dua versi yang berkembang dalam lingkungan masyarakat Tarakan saat ini. Versi pertama meyakini adanya bentuk pemerintahan kekuasaan kerajaan yang pernah berkembang di Tarakan hingga awal abad ke-20 Masehi. Masyarakat Tarakan yang mengakui versi ini menginformasikan raja yang terakhir berkuasa di Tarakan bernama Datu Adil. Menjadi raja di Tarakan sejak tahun 1896 – 1916 (Akbarsyah, 2001: 3). Tetapi kenyataan pada tahun 1880-an ialah bahwa daerah-daerah perbatasan ini (perbatasan antara Kerajaan Sulu dan Kerajaan Bulungan) hampir tidak dihuni orang. Laporan Belanda menyebutkan kekosongan daerah perbatasan ini disebabkan oleh bahaya bajak laut sehingga penduduk telah mencari tempat yang lebih aman (Adrian B. Lapian, 2009: 188).

Minimnya data historis maupun data arkeologis yang dapat mendukung penguatan versi pertama ini, menyulitkan menguraikan lebih mendalam kondisi sosial Tarakan sebelum abad ke-19 Masehi. Tidak cukup sumber yang berhasil diperoleh untuk membenarkan versi ini tentang adanya kerajaan yang dibangun oleh masyarakat Tidung di Tarakan sebagaimana diakui penganut versi ini kecuali pembenarannya sebagai penghuni awal atas Pulau Tarakan. Sekalipun penganut versi ini telah membuat Silsilah Kerajaan Tidung Tarakan (1076 – 1916). Namun masih perlu kajian lebih lanjut untuk mengetahui keabsahan terhadap isi materi yang diinformasikan dalam silsilah tersebut. Sebaliknya versi kedua justru mengakui Tarakan tidak pernah ada bentuk kekuasaan mandiri setingkat kerajaan. Mereka mengakui bahwa Tarakan pada mulanya merupakan bagian dari Kerajaan Berau lalu berpindah penguasaan setelah Kerajaan Bulungan berdiri pada abad 19 Masehi. Memang pulau ini telah dihuni oleh kelompok mereka (penduduk Tidung) tetapi kisarannya paling awal abad ke-16 Masehi.

Meskipun terdapat beberapa makam kuno di Juata Laut, Peningki Lama dan Pamusian yang mengindikasikan adanya pemukiman awal pada periode Islam, namun sulit menyimpulkan orang – orang yang dimakamkan hubungannya dengan eksistensi masyarakat Tidung itu sendiri sebagai penduduk awal Tarakan. Di Pamusian misalnya, terdapat makam kuno yang dikeramatkan warga setempat. Pemilik makam bernama Syarif Hamsa Al marzak seorang penyiar Islam di wilayah utara Kalimantan (Juniar Purba, 2008: 9). Berarti pemilik makam tersebut adalah orang luar atau bukan penduduk etnis Tidung. Kemudian di daerah Juata laut terdapat makam tua memiliki jirat dan nisan berukir sulur daun terbuat dari kayu ulin. Masyarakat Tidung setempat lebih meyakini dan menyebutnya sebagai makam Puang Bajo (makam orang Bajo/Bajau).

Lain lagi dengan salah satu makam pada kompleks yang sama (di Juata Laut) terdapat aksara fegon pada bagian nisan batu yang menunjukkan orang yang dimakamkan bernama Daeng Sena meninggal pada tahun 1011 Hijriah (1603 Masehi). Nama Daeng Sena erat kaitannya dengan nama khas orang Bugis atau orang Makassar. Semua data tersebut hanya mengindikasikan jejak penduduk penghuni

awal Tarakan yang telah menganut Islam. Belum cukup bukti untuk menarik asumsi adanya jejak kaitannya dengan bukti bentuk permukiman yang diorganisir pemerintahan setingkat kerajaan. Jika data tersebut disepakati sebagai bukti awal permukiman di Pulau Tarakan, maka dapat dikatakan bahwa Pulau Tarakan telah dihuni sekitar abad ke-16 Masehi. Sekaligus menunjukkan keberadaan orang Bajau dan orang Bugis telah ada di Pulau Tarakan pada periode tersebut.

Pada awalnya kehadiran Kolonial Belanda di Kalimantan Timur bagian utara khususnya di Tarakan merupakan rangkaian dari usaha – usaha yang telah dirintis *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) atas kawasan ini. Sebelumnya, VOC telah mendapatkan penyerahan atas seluruh wilayah Kalimantan Timur melalui Sultan Banjarmasin. Wilayah Kalimantan Timur saat itu dikuasai oleh tiga kekuatan kerajaan lokal yakni Kerajaan Paser (Paser), Kerajaan Kutai dan Kerajaan Berau. Akan tetapi daerah ini masih jarang didatangi dan belum terjadi hubungan secara intensif dengan penguasa lokal tersebut. Periode selanjutnya ketika Kerajaan Berau sendiri setelah mengalami perpecahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terbagi menjadi tiga kerajaan. Ketiga kerajaan tersebut (Kerajaan Bulungan, Kerajaan Sambaliung dan Kerajaan Gunung Tabur) selanjutnya mengadakan perjanjiannya tahun 1850 dan mengakui Belanda sebagai penguasa tertinggi. Hal ini menunjukkan Belanda pada tahun tersebut telah resmi menguasai daerah di wilayah utara Kalimantan Timur termasuk Tarakan.

Titik awal perhatian Belanda atas Tarakan dimulai pada tahun 1879. Terkait dengan memanasnya suhu politik antara Belanda dengan Inggris karena tidak adanya kejelasan batas wilayah kekuasaan di daerah Kalimantan Utara. Pihak Belanda menganggap Inggris telah melanggar perjanjian perbatasan di wilayah tersebut. Misalnya, pada tahun 1877 Sultan Brunai memberi sebuah perusahaan swasta Inggris, *North Borneo Company*, hak kedaulatan atas sebuah daerah yang oleh Belanda dianggap sebagai wilayahnya (Scholten, 2008: 221). Kondisi ini menjadi tekanan yang memaksa Belanda mengintensifkan pengawasan daerah perbatasan yang dianggap sebagai wilayahnya. Setidaknya Belanda juga telah memikirkan signifikansi Tarakan dalam aspek strategis dan politik sebelum menyadari adanya potensi sumber

minyak. Tarakan telah menjadi titik pertahanan Belanda terkait dengan upaya memperkuat dan memperketat batas kekuasaannya. Mereka melakukan penancapan bendera di Batu Tinagat sebelah utara Tarakan pada tahun 1879. Seorang *Controleur* ditempatkan di Muara Tawao (Tawau), sedangkan kapal perang Belanda mengadakan patroli dari pangkalan yang didirikan di Tarakan (Adrian B. Lopian, 2009: 193).

Gambaran singkat di atas menunjukkan tentang asal – usul, peran dan keadaan lingkungan sosial serta terbukanya Tarakan sebagai bagian dari dunia jelajah baru. Setidaknya menjadi pengantar dalam mengetahui latar belakang Tarakan sebelum berlangsungnya aktivitas pertambangan minyak di daerah ini. Suatu pemahaman singkat yang dapat dijadikan bandingan pemahaman sejarah antara Tarakan pra pertambangan dan Tarakan pada masa pertambangan minyak. Tarakan pada periode pertambangan merupakan sebuah aktivitas yang menjadi titik pangkal pembahasan ini dalam menggambarkan terbentuknya identitas masyarakat Kota Tarakan yang dilekatkan pada masa lalu. Aspek historiografi lokal ini tentunya memiliki nilai penting khususnya bagi masyarakat lokal Tarakan sekarang sebagai pemahaman masa lalu terhadap diri dan lingkungannya.

3.2.2 Tarakan Pada Masa Pertambangan Minyak

Proses pertumbuhan dan perkembangan kota di Indonesia memperlihatkan latar belakang yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang sejarah pembentukannya. Ada kota yang terbentuk dilandasi oleh aktivitas perdagangan, perkebunan dan aktivitas industri pertambangan serta pusat administrasi pemerintahan. Demikian halnya periode pembentukan kota-kota yang ada menunjukkan perbedaan. Ada kota yang tumbuh dan berkembang pada masa kerajaan, seperti kota – kota kuno pada masa kerajaan Hindu-Budha dan kota – kota Islam yang berpusat pada bandar-bandar pesisir pantai. Ada pula kota yang tumbuh dan berkembang pada masa penjajahan Belanda. Kota pada masa ini sering dikategorikan sebagai kota kolonial atau kota industri modern yang salah satunya adalah Kota Tarakan. Tumbuh dan berkembang karena adanya kegiatan industri pertambangan minyak. Kota Tarakan termasuk dalam kategori kota kolonial

sekaligus sebagai kota industrialisasi modern. Selanjutnya mendapat julukan sebagai kota tambang minyak. Proses pertumbuhan dan perkembangan awal kota ini sejalan dengan awal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber minyak bumi oleh Belanda. Kandungan potensi sumber minyak bumi Tarakan menjadi nilai penting daerah ini yang mengantarkan berkembang menjadi sebuah kota di akhir abad ke-19 Masehi.

Periode akhir abad ke-19 Masehi dipandang sebagai awal dari perubahan morfologi atau perubahan lingkungan fisik Tarakan yang memperlihatkan perbedaan lingkungan Tarakan dari periode sebelumnya. Tarakan mengalami proses perkembangan dan perubahan fisik menjadi sebuah lingkungan kota yang memperlihatkan karakteristik fisik kota yang berbeda dengan kota-kota kolonial dan kota tambang lainnya di Indonesia. Praktis Tarakan mengalami perubahan lingkungan fisik dan sosial sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber minyak bumi di daerah ini. Aktivitas pertambangan minyak ini menjadi dasar pertumbuhan dan perkembangan awal Tarakan menjadi kota tambang minyak. Perubahan lingkungan fisik dan sosial yang terjadi selanjutnya menjadi representasi penanda identitas masyarakat Kota Tarakan.

Kondisi ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan konsep tema *display* yang dapat dikomunikasikan melalui museum sejarah. Suatu peran museum sejarah yang menggunakan historiografi lokal untuk membentuk kembali dan memelihara identitas masyarakat Kota Tarakan yang dilekatkan pada masa lalu. Telah menjadi dasar asumsi bahwa Kota Tarakan merupakan kota yang tumbuh dan berkembang dilandasi aktivitas pertambangan minyak dan telah menjadi ruang terciptanya memori kolektif masyarakat Tarakan. Memori kolektif tersebut dapat dijadikan sebagai memori sejarah yang memberi arti bagi kepentingan masyarakat Tarakan sekarang. Telah memori sejarah yang penting dilindungi dan dikomunikasikan melalui museum.

Faktor awal pertumbuhan Tarakan menjadi sebuah kota tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya tekanan kebutuhan pemasukan kas Hindia Belanda pada periode abad ke-19 Masehi. Kondisi ini memaksa Pemerintah Hindia Belanda mencari sumber - sumber ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Pemerintah Hindia Belanda

mengeluarkan kebijakan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam khususnya tambang minyak bumi yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia setelah sukses melakukan eksplorasi pada tahun 1880-an. Mengeluarkan peraturan baru dengan memberi peluang keikutsertaan perusahaan swasta asing lainnya dalam pemanfaatan kekayaan sumber minyak di berbagai daerah di Indonesia melalui konsesi pertambangan yang diatur Belanda. Hal yang sama juga terjadi di Tarakan yang memunculkan babak sejarah baru bagi pulau ini. Sejarah baru dimaksud terkait dengan sejarah awal proses pembentukan Kota Tarakan sebagai kota tambang minyak. Pulau Tarakan mengalami proses perubahan morfologi menjadi kota minyak. Demikian julukan yang muncul atas Tarakan setelah dimulainya pertambangan minyak yang menarik perhatian masyarakat luar. Bahkan kemudian menjadi rebutan negara industri terutama Belanda dan Jepang.

Sejarah pengeboran minyak di Indonesia pertama kali dilakukan di daerah Cibodas Tangat Jawa Barat tahun 1872. Dilakukan oleh J. Reerink dengan teknik sangat sederhana menggunakan tenaga kerbau untuk menggerakkan mata bor yang terbuat dari kayu. Pengeboran ini tidak mendapatkan produksi minyak. Setahun kemudian J. Reerink kembali melanjutkan pengeboran pada daerah yang sama (kurang lebih 100 meter dari tempat pengeboran pertama) tahun 1874 setelah kembali dari belajar tentang teknik pengeboran minyak bumi di Amerika. Mereka mulai menggunakan tenaga mesin uap untuk menggerakkan mata bor, namun tetap tidak menghasilkan produksi minyak bumi. Upaya pengeboran selanjutnya dimulai pada tahun 1880, oleh A.J. Zijlker seorang pegawai perkebunan tembakau Belanda di Langkat Sumatera Utara. Mereka terus melakukan pengeboran pada titik lokasi yang dianggap memiliki kandungan minyak bumi hingga memasuki tahun 1885 di daerah yang sama. Sumur terakhir dibor dengan kedalaman 31 meter mampu menghasilkan minyak 8640 liter. Sumur ini dikenal sumur “Telaga Tunggal” yang menjadi penanda awal adanya minyak di Indonesia yang dikomersilkan (LEMIGAS, 1985: 11-13). Kedua tempat pengeboran awal yang dilakukan oleh J. Reerink juga tidak menghasilkan produksi minyak bumi. Tindakan tersebut dianggap sebagai perintis awal pengeboran minyak yang mengenalkan dunia perminyakan Indonesia. Suatu

kegiatan yang menarik perhatian Kerajaan Belanda dan Pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia saat itu.

Antara tahun 1865 – 1870 Belanda terus melakukan eksplorasi dengan mengambil sampel di berbagai daerah di Indonesia yang dianggap memiliki kandungan minyak dan berhasil menemukan 52 lokasi. Sejalan dengan itu juga mulai membentuk perusahaan minyak bernama perusahaan minyak *Dordtsche* (1887) dan perusahaan Kerajaan Belanda untuk eksplorasi sumber minyak di Hindia Timur Belanda yang dikenal *Koninklijke* (1890). Para insinyur pionir memastikan konsesi, dan bank-bank Eropa menyuntikkan modal. *Koninklijke* menyalurkan minyak mentah pertamanya dari Sumatera pada tahun 1890 (Scholten, 2008: 225). Demikian aktivitas pertambangan minyak dari tahun ke tahun terus bertambah hingga menjangkau seluruh wilayah Hindia Belanda. Aktivitas pertambangan minyak bumi terus berlanjut pada tahun berikutnya dan mulai dilakukan secara intensif di beberapa daerah seperti di Kruka Jawa Timur (1887), Ledok Cepu (1893), Sanga – Sanga Kalimantan Timur (1897), Talang Akar (1921). Kemudian didirikanlah kilang pengolahan di beberapa tempat seperti di Pangkalan Brandan (1891), Wonokromo (1890), Cepu (1894), Balikpapan (1894), dan Sungai Gerong (1926)

Setelah ditemukannya sumber minyak bumi di Tarakan pada tahun 1896, Maka Belanda melalui perusahaan minyaknya *Koninklijke Nederlandsche Petroleum Company* mulai melakukan eksploitasi minyak bumi di Tarakan pada tahun 1899. Sayangnya tidak didapatkan banyak data yang menguraikan kondisi awal pengeboran minyak di daerah ini hingga tahun 1907. Kemungkinan produksi minyak telah terjadi di antara tahun tersebut mengingat kilang pengolahan minyak telah dioperasikan di Balikpapan yang didirikan tahun 1894.

Belajar dari pengalaman yang menyebabkan upaya Belanda mengeksploitasi sumber – sumber mineral di Indonesia tidak lancar dan sering menemui kegagalan, maka praktek monopoli seperti yang dilakukan VOC mulai dirubah. Belanda menjalankan peraturan baru yang memisahkan urusan pemerintahan dengan perdagangan dan pengangkutan. Sistem pengaturan pertambangan minyak yang lebih dikenal dengan konsesi diterapkan melalui perjanjian yang menghormati hak

penguasa lokal. Kemudian Belanda memegang hak pengusahaan minyak tersebut juga diterapkan pada masa awal pertambangan minyak di Tarakan. Pengaturannya mengacu pada Undang-Undang Pertambangan mineral yang dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1899. Peraturan pertambangan ini dikeluarkan sehubungan dengan perkembangan politik Belanda dalam memanfaatkan hasil kekakayaan tambang minyak di Indonesia. Selain itu juga karena munculnya desakan dari perusahaan tambang minyak negara industri lainnya seperti Amerika dan Inggris untuk ikut mengambil bagian dalam pengeboran minyak bumi di wilayah Hindia Belanda. Beberapa ketentuan pokok dalam peraturan pertambangan tersebut dinyatakan antara lain adalah :

- a. Izin untuk kegiatan eksplorasi bahan galian dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Daerah bersangkutan. Izin tersebut dapat diberikan untuk daerah seluas 10.000 hektar selama jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing selama satu tahun.
- b. Konsesi untuk mengusahakan bahan galian diberikan oleh yang berwenang. Permohonan konsesi ditujukan kepada Gubernur Jenderal oleh pemegang izin eksplorasi dengan disertai dokumen-dokumen yang menunjukkan tentang adanya bahan galian di tempat yang diperkirakan dan secara teknis dapat diusahakan. Dokumen-dokumen tersebut harus dikirim kepada Jawatan Pertambangan. Konsesi dapat diberikan untuk jangka waktu 75 tahun dengan daerah kerja seluas 1000 hektar.
- c. Izin eksplorasi bahan galian dan konsesi hanya dapat diberikan kepada warga negara/penduduk negeri Belanda atau penduduk Hindia Belanda, dan perusahaan –perusahaan yang didirikan di negeri Belanda yang sebagian besar pengurusnya harus orang Belanda asli atau penduduk Hindia Belanda yang tinggal di Belanda atau Hindia Belanda. Bagi perorangan atau perusahaan yang tidak berasal dari atau didirikan di Hindia Belanda, sekurang-kurangnya harus terlebih dahulu mendirikan perwakilan di Hindia Belanda.

- d. Izin eksplorasi maupun konsesi dapat dipindahtangankan kepada pihak lain yang memenuhi syarat-syarat di atas
- e. Pemegang izin eksplorasi dan pemegang konsesi wajib membayar pajak masing-masing sebesar 2½ sen dan 25 sen gulden per hektar. Disamping itu pemegang konsesi diwajibkan membayar *royalty* sebesar 4% dari nilai hasil produksi (LEMIGAS, 1985: 36).

Konsesi awal pertambangan minyak di Tarakan diberikan oleh Sultan Bulungan sebagai pemegang hak atas Tarakan yang menjadi bagian dari wilayah kerajaannya. Izin konsesi ini disebut konsesi I Pamusian. Konsesi I Pamusian mencakup keseluruhan daratan Pulau Tarakan, selanjutnya oleh Belanda dibagi menjadi lima konsesi pada tahun 1926. Sehingga terlihat seluruh daratan Pulau Tarakan terbagi dalam lima konsesi tersebut. Konsesi I berada dibagian selatan mencakup daerah Tanjung Batu, Tanjung Pasir, Karungan, Mamburungan, Pamusian, Lingkas Ujung, Markoni, sebagian Kampung Empat hingga daerah Amal (Amal Lama) bagian timur. Konsesi II bagian selatan berbatasan dengan konsesi I sehingga daerah seperti Pamusian sebagian masuk wilayah konsesi I. Daerah lainnya yang masuk dalam konsesi ini, seperti Pasar Batu (Sebengkok), Kampung Pukat, Selumit, Kampung Bugis, Kampung Baru, dan Sesanip (Juata Bor /Juata kerikil). Konsesi III menempati daerah bagian timur Pulau Tarakan, berbatasan dengan konsesi I di bagian selatan dan konsesi IV dibagian timur. Konsesi III menempati daerah sebagian Kampung Empat dan Kampung Enam bagian timur, Tanjung Binalatung hingga daerah Sungai Manggatal. Konsesi IV meliputi daerah Pamusian Timur, Kampung Empat, Kampung Enam, Kampung Satu, Sesanip bagian timur hingga ke utara daerah Juata Laut bagian timur. Konsesi V menempati lokasi bagian utara Pulau Tarakan berbatasan dengan konsesi IV di sebelah timur dan konsesi II di bagian selatan. Daerah yang masuk dalam konsesi ini antara lain Kampung Juata Laut, daerah aliran Sungai Boenjoe (Bunyu?), Gunung Cangkul dan Juata bor.

Pada awalnya eksplorasi dan eksploitasi minyak di Tarakan di lakukan oleh perusahaan tambang minyak Belanda. Kemudian masuk pula perusahaan tambang minyak Inggris bernama SHELL sekitar tahun 1912. Perusahaan swasta Belanda

Koninklijke Nederlansche Pertoleum Company merupakan perusahaan tambang minyak perintis pembuka tambang minyak di Tarakan dimulai pada tahun 1899. Perusahaan mengoperasikan ladang minyak di Tarakan sebelum Belanda melakukan kerja sama pertambangan minyak di Indonesia. Setelah Belanda dan Inggris melakukan hubungan kerja sama dan untuk menguatkan kekuatan, keduanya sepakat untuk menggabungkan perusahaan Tambang mereka pada tahun 1912. Gabungan perusahaan tambang minyak *Koninklijke Nederlansche Pertoleum Company* (KNPC) dan *Royal Dutch* (belanda) dengan *Shell* (Inggris) menjadi lebih kuat. KNPC dan *Royal Dutch* menguasai sumur-sumur ladang minyak di Indonesia dan perusahaan tambang minyak *Shell* (Inggris) yang memiliki kapal – kapal tanker dan tenaga ahli pemasaran minyak. Gabungan kedua perusahaan ini melahirkan perusahaan bernama *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM). BPM merupakan anak perusahaan yang mengoperasikan sumur – sumur dan kilang-kilang minyak di Indonesia.

Kemudian di Tarakan juga terjadi penggabungan yang sama pada tahun 1907. Gabungan dua perusahaan tambang minyak raksasa tersebut di Tarakan membentuk *The Koninklijke Shell Group* atau *Shell*. BPM sebagai anak perusahaan gabungan yang beroperasi di ladang minyak Tarakan, juga terdapat dua anak perusahaan lainnya yaitu *Aziatic Petroleum Company* bergerak di bidang produksi dan *Saxon Petroleum Company* bergerak dibidang pengangkutan minyak keluar dari Tarakan. Data hasil survei lapangan yang menguatkan kehadiran *Shell* di Tarakan adalah adanya sejumlah tulisan *Shell* di lokasi eks wilayah kerta pertambangan BPM/Shell dan saat ini dikuasai oleh perusahaan minyak Pertamina. Terbuat dari bahan besi baja ditempelkan pada plat besi pipih melintang berpotongan dengan pipa besi yang salah satu ujungnya ditancapkan ke dalam tanah setinggi antara 20 – 30 meter dari permukaan tanah. Benda ini sangat erat kaitannya dengan fungsi sebagai tanda batas dan tanda jalur pipa. Tanda ini biasanya dihubungkan dengan batas wilayah kerja pertambangan dan jalur jaringan pipa minyak bawah tanah.

3.3 Demografi Kota Tarakan: Awal Terbentuknya Masyarakat Plural dan Masyarakat Multikultur

Jika penduduk Tarakan relatif sedikit dan cenderung tidak memiliki aktivitas yang kompleks sebelum pertambangan minyak dimulai, maka setelah dimulainya pertambangan minyak bumi, terjadi lonjakan jumlah penduduk. Lonjakan penduduk dipicu oleh kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk pertambangan minyak. Hal ini menandakan awal terbentuknya suatu ciri kehidupan sosial masyarakat kota tambang yang heterogen dan aktivitas yang majemuk. Gambaran populasi penduduk Tarakan dapat diketahui setelah dimulainya aktivitas pertambangan minyak bumi, namun tidak diperoleh data pasti hingga memasuki tahun 1929. Periode ini menunjukkan adanya suatu proses perubahan yang agak berbeda dari masa sebelumnya. Baik perubahan lingkungan fisik karena dibangunnya prasarana dan sarana pertambangan maupun keadaan populasi penduduk Tarakan.

Sejarah perkembangan demografi Kota Tarakan memperlihatkan arus mobilisasi migran berbeda, baik masa awal maupun pada saat kegiatan pertambangan minyak bumi telah berjalan. Mobilisasi dimaksud adalah keadaan suatu masyarakat yang melakukan perpindahan (migrasi) baik yang difasilitasi oleh perusahaan tambang minyak BPM/Shell maupun penduduk yang datang sendiri ke Tarakan setelah berlangsungnya aktivitas pertambangan minyak.

Sebagaimana lazimnya suatu masyarakat perkotaan, Kelompok-kelompok masyarakat Tarakan pada masa pertambangan menempati kluster – kluster secara umum dibedakan atas dua yakni kelompok masyarakat pekerja tambang dan kelompok masyarakat non tambang. Masyarakat non tambang umumnya menempati daerah pesisir pantai yang dicirikan aktivitas utamanya sebagai nelayan dan pedagang. Sedangkan kelompok masyarakat pekerja tambang menempati daerah yang berdekatan dengan wilayah kerja pertambangan di bawah kontrol perusahaan tambang minyak Shell/BPM. Sekalipun telah banyak berubah namun masih memperlihatkan pola bermukim seperti itu hingga sekarang. Masyarakat Tidung, Banjar, dan Bugis dan lainnya tetap mendominasi pemukiman daerah pesisir barat mengembangkan mata pencaharian berdagang dan nelayan di Selumit, Kampung

Pukat dan Pasar Batu Sebengkok dan Juata Laut. Sementara Masyarakat Jawa, Timor dan sebagian orang Cina di Markoni mendominasi daerah – daerah yang berdekatan dengan eks wilayah kerja pertambangan mendominasi daerah Kampung satu, Kampung Empat, Kampung Enam, Markoni, dan ladang.

Berdasarkan data *National Archive the Hague archive 2.1-3.9*, diperoleh informasi jumlah penduduk dan etnis di Tarakan sejak tahun 1929 sampai tahun 1939 terdiri dari orang eropa, Arab, Cina, dan India serta Jepang. Kemudian orang pribumi umumnya adalah orang, Tidung, Banjar, Bugis, Makassar, Jawa, Manado, dan Banda. Penduduk tersebut dalam sejarah eksistensinya di Tarakan terutama orang Asing tidak semuanya dimobilisasi oleh Belanda. Seperti Orang Cina sekitar tahun 1939 sebagian datang di Tarakan tidak direkrut oleh Belanda untuk bekerja di pertambangan Minyak. Menurut informasi masyarakat sebagian Orang Cina berlayar sendiri datang dan tinggal di Tarakan. Kemungkinan mereka datang dari daerah Kalimantan Barat mengingat kehadiran orang-orang cina di daerah tersebut jauh sebelum dibukanya pertambangan minyak di Kalimantan. Mereka datang di Tarakan ketika pertambangan minyak mulai berjalan. Sehubungan dengan kedatangan etnis Tionghoa/Cina di Kalimantan Barat, Heidhues (2008: xvi - vii), mengatakan:

Secara historis, Kalimantan Barat bersama dengan Sumatera bagian timur, Bangka – Belitung dan Kepulauan Riau, adalah satu dari empat daerah pemusatan etnis Tionghoa di Indonesia di luar Jawa. Para migran Tionghoa yang datang di Kalimantan Barat, umumnya mengatur migrasi mereka, menggunakan jaringan mereka sendiri, telah bermukim lama dan bahkan turun temurun sejak abad ke 18.

Demikian juga orang Jepang, datang sendiri tetapi memiliki misi yang berbeda. Mereka datang dan tinggal di Tarakan sebagai mata – mata untuk kepentingan perang perebutan kekuasaan. Menyamar sebagai nelayan untuk mengetahui lingkungan sekitar Pulau Tarakan dan mengukur kedalaman laut perairan Tarakan. Bahkan menjadi pekerja pembuatan benteng – benteng pertahanan Belanda yang mulai dibuat pada tahun 1936. Hal yang sama sebagai pendatang baru atas caranya sendiri mengikuti jejak rekannya pada periode pra pertambangan, juga dilakukan oleh orang-

orang Bugis, Makassar dan Banjar. Mereka datang ke Tarakan tanpa difasilitasi oleh Belanda. Mereka tinggal diperkampungan lama seperti Selumit, lingkas, Sebengkok, Kampung bugis dan Juata Berbaur dengan masyarakat Tidung dan Bajo/Bajau. Akan tetapi setelah di Tarakan banyak pula yang masuk dan ikut menjadi buruh tambang minyak.

Data *National Archive the Hague archive 2.1-3.9*, menunjukkan bahwa penduduk Tarakan pada tahun 1929 berjumlah 8.620 orang. Pada tahun ini penduduk Tarakan lebih didominasi oleh orang Jawa mencapai 90 %. Menunjukkan bahwa etnis lain belum begitu banyak di Tarakan pada masa itu. Sekedar diketahui bahwa orang Jawa pertama kali datang di Tarakan dimobilisasi oleh Belanda melalui perusahaan tambang minyak Shell/BPM untuk dipekerjakan sebagai buruh tambang minyak. Mereka di tempatkan di pemukiman kompleks BPM di daerah Lingkas, Peningki Baru, Juata dan daerah Pamusian sebanyak 7.298 orang. Kemungkinan daerah Pamusian dimaksud mencakup daerah Distrik I (Kampung Satu), Distrik IV (Kampung Empat) dan Distrik VI (Kampung Enam), mengingat perumahan BPM di daerah ini sebagian telah dibangun sejak tahun 1920-an. Perumahan ini masih banyak yang bertahan hingga sekarang dan ditempati dominan keturunan etnis Jawa. Penduduk lainnya yang tidak bekerja sebagai buruh tambang sebagian juga bermukim di daerah pesisir pantai Lingkas sekitar 268 orang, dan di Juata (Juata Laut?) sekitar 360 orang. Tidak diketahui secara pasti jumlah etnis yang bermukim pada kedua tempat tersebut apakah semuanya masyarakat etnis Tidung atau pembauran dari berbagai etnis.

Pada tahun 1934 tidak diperoleh data pasti mengenai populasi penduduk Tarakan. Hanya saja tetap terjadi kecenderungan peningkatan jumlah penduduk baik yang bekerja di pertambangan minyak BPM/Shell maupun diluar tambang. Hal ini dapat diamati dari meningkatnya kecenderungan terbukanya pemukiman baru khususnya di luar kompleks pertambangan. Hasil sensus yang didapatkan hanya menyebutkan rata – rata penduduk berdasarkan etnis seperti etnis Jawa 50 %, Tidung dan Melayu 20 %, Banda 25 %, sekitar 120 orang dari etnis Bugis, dan puluhan lainnya etnis Timor, Sunda dan Madura. Penduduk berkebangsaan Asing seperti Arab

dan India sebanyak 80 orang berasal dari Malabar. Etnis Cina cenderung meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 2.150 orang, namun tidak melebihi penduduk etnis Jawa sekitar 50 % dari populasi seluruhnya. Penduduk etnis Jawa mengalami penurunan selain dipengaruhi oleh kontrak kerja telah berakhir dan juga disebabkan oleh tingginya biaya hidup dibanding di Tanah Jawa. Hampir semua bahan kebutuhan pokok didatangkan dari luar Pulau Tarakan. Banyak penduduk etnis Jawa berakhir masa kontrak kerjanya tidak melakukan perpanjangan dan sebagian memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya. Kebutuhan bahan pokok yang dipasarkan di Tarakan dibawah oleh para pedagang etnis Bugis dan Banjar.

Para pekerja tambang golongan bawah umumnya dikontrak satu tahun dan dapat memperpanjang masa kerja jika yang bersangkutan menginginkan atau masih diterima oleh perusahaan minyak BPM/Shell. Pekerja tambang minyak etnis Jawa yang berakhir masa kontraknya sebagian diantaranya memutuskan untuk tetap tinggal di Tarakan dan mencari pekerjaan baru. Mereka mendirikan rumah tinggal tidak jauh dari kompleks perumahan BPM. Hal yang sama juga dilakukan oleh penduduk etnis Cina yang tidak lagi bekerja sebagai buruh tambang minyak. Mereka mulai membentuk pemukiman baru sebagaimana tradisi mereka di beberapa daerah lain di Indonesia. Mereka melakukan usaha perdagangan di luar kompleks perumahan tambang dan sebagian memutuskan membuka usaha perkebunan dan pertukangan. Di Tarakan etnis Cina tersebut pada awalnya lebih terfokus membuka usaha dagang dan mendirikan Rumah Toko (RUKO) di daerah Markoni berdampingan dengan bangsal tempat tinggal pekerja tambang minyak. Sebagian mengarah ke timur daerah Gunung Cakui hingga ke Pasar Batu I. (sekarang ditempati Bengkel Pertamina). Nama Gunung Cakui muncul setelah etnis Cina bermukim di lokasi tersebut. Kebetulan di antara mereka ada yang menjadi tukang pembuat kue tradisonal khas Cina yang diberi nama "kue cakui". Kue ini tidak hanya digemari oleh penduduk etnis Cina saja, tetapi juga penduduk lainnya. Keberadaan pembuat kue di lingkungan ini lambat laun daerah bukit tempat pembuat kue cakui ini selanjutnya lebih dikenal Gunung Cakui.

Pertumbuhan penduduk Tarakan dari tahun ke tahun semakin bertambah sejalan dengan meningkatnya produksi minyak yang menuntut tenaga kerja lebih banyak dari

sebelumnya. Demikian juga pendatang baru terus bertambah menggantungkan harapan baru di kota ini. Pada tahun 1935, penduduk Tarakan sudah mencapai 9.597 orang. Pada tahun 1936 mengalami lonjakan dengan jumlah penduduk 11.000. Pada tahun ini Belanda telah membentuk sistem administrasi pemerintahan sipil yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Membawahi daerah Pulau Bunyu, Pulau Mandul (Tanah Merah), Nunukan, dan Pulau sebatik dan Tarakan sendiri sebagai pusat administrasi. Antara tahun 1935 – 1937 Belanda mengontrak orang-orang dari luar Tarakan untuk bekerja sebagai tenaga administrasi dan keamanan. Orang-orang yang direkrut umumnya dari Banjarmasin yang memiliki pengalaman bekerja dibidang pemerintahan. Mereka dipekerjakan sebagai Polisi Kota, Polisi Pemerintah dan polisi Pamong Budaya yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan dan kontrol penyelundupan opium serta pendatang gelap. Petugas keamanan ini memiliki jenjang profesi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Formasi Polisi Pengamanan Wilayah Pemerintahan
Asisten Residen Tarakan Tahun 1936

No	Jabatan	Polisi Kota	Polisi Pemerintah	Polisi Budaya
1	Inspektur polisi	1	-	-
2	Komandan Polisi		1	-
3	Agen Polisi Kelas I	3	2	28
4	Agen Polisis Kelas II	5	4	-
5	Mantri Polisi	2	-	-

Sumber: *National Archive the Hague, archive 2.1-3,9 Memories van overgave, nr. 1080*

Kedudukan Tarakan dalam sistem pemerintahan ini disejajarkan dengan Samarinda yang juga ditempatkan pegawai Asisten Residen. Asisten Residen Tarakan dibantu oleh dua staf Onderafdeeling yaitu Onderafdeeling Bulongan en Tidoeng Landen dan Onderafdeeling Berau. Cakupan kedua wilayah Onderafdeeling ini membawahi seluruh daerah di wilayah Kalimantan Timur bagian utara atau seluruh

bagian kekuasaan Kesultanan Berau sebelum mengalami perpecahan. Wilayah bagian utara tersebut mencakup daerah Tarakan, Tanjung Selor (eks pusat pemerintahan Kesultanan Bulungan), Berau, Malinau, dan Apau Kayan.

Tabel 3.2
Penduduk Pulau Tarakan Yang Bermukim
di Luar Kompleks BPM/Shell

No	Daerah/Kampung	Penduduk Etnis Mayoritas	Jumlah
1	Lingkas	Banjar	102 orang
2	Sebengkok	Banjar dan Jawa	302 orang
3	Selumit	Tidung	576 orang
4	Sidodadi	Jawa	449 orang
5	Pamoesian	Banjar dan Jawa	328 orang
6	Kampoeng Boegis	Bugis dan Makassar	313 orang
7	Pamusian	Banjar dan Jawa	328 orang
8	Mamburungan	Tidung	576 orang
9	Djoeata	Tidung	319 orang
		Jumlah	3293 orang

Sumber : *National Archive the Hague, Archive 2.1-3.9
Memories van Overgave, nr. 1080*

Catatan:

Nama daerah, etnis dan jumlah penduduk di atas dikutip setelah disusun berdasarkan keperluan penelitian. Terdapat nama daerah, etnis dan jumlah penduduk dalam tabel asli tidak dimasukkan karena tidak berada dalam Pulau Tarakan.

Data di atas menunjukkan bahwa penduduk Tarakan semakin ramai dan tidak hanya dicirikan pemukiman pertambangan minyak. Terlihat penduduk sudah bermukim secara permanen di luar Kompleks BPM/Shell. Namun bagaimana pun masyarakat non tambang tersebut juga memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan tambang minyak sebagai masyarakat penyuplai keperluan masyarakat tambang. Penduduk dengan jumlah 3293 orang yang bermukim diluar kompleks pertambangan BPM/Shell tersebut telah membentuk permukiman permanen yang berkembang

hingga sekarang. Terbentuknya perkampungan di luar kompleks pemukiman BPM disebabkan jumlah pendatang semakin ramai termasuk pekerja kontrak tambang minyak yang pindah bermukim di luar kompleks khususnya bagi pekerja etnis Jawa dan Cina. Pemukim mantan pekerja inilah yang kemudian menurunkan generasi etnis Jawa dan Cina hingga sekarang.

Penduduk etnis Tidung yang dianggap sebagai penduduk pertama bermukim di Tarakan juga semakin berbaur dengan etnis lainnya walaupun di beberapa kampung masih dominan seperti di Selumit, Mamburungan (Peningki Lama) dan Juata. Juata dimaksud adalah Juata Laut kampung Tidung di ujung utara Tarakan yang kemungkinan telah lama berbaur dengan etnis Bajo dan etnis Bugis. Hal ini didasarkan pada adanya makam kuno Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (lihat Tarakan pra pertambangan). Menempati daerah pesisir pantai yang oleh Belanda dijadikan sebagai basis pertahanan pada tahun 1936. Penduduk di lokasi ini dipindahkan ke sebelah barat tidak jauh dari kampung semula.

Penduduk di luar Pulau Tarakan yang menjadi bagian dari wilayah administrasi kependudukan pemerintahan Asisten Residen Tarakan, juga mulai ramai. Menempati daerah-daerah yang umumnya dihuni oleh etnis Banjar dan Tidung. Antara tahun 1936-1939 beberapa pulau di luar pulau Tarakan telah didiami penduduk etnis Banjar dan Tidung. Seperti di Pulau Mandul, yakni etnis Tidung di Kampung Tanah Merah telah mencapai 181 orang, dan di kampung Tanjung Kramat sebanyak 81 orang. Kemudian di Pulau Bunyu (Boenjoe) telah bermukim etnis Tidung 89 orang, di pulau Sebatik daerah Sei Taboh didominasi etnis Tidung sebanyak 153 orang. Selanjutnya di Pulau Nunukan (Noenoekan) merupakan campuran etnis Tidung dan Banjar sebanyak 481 orang. Daerah tersebut hingga tahun 1939 nampaknya belum begitu banyak dihuni etnis lain seperti Bugis yang justru menjadi penduduk mayoritas di kawasan ini pada periode kemudian khususnya setelah periode Kemerdekaan seperti di daerah Nunukan dan Tarakan.

Data arsip Belanda juga menunjukkan bahwa penduduk Tarakan pada periode ini mulai dikenakan berbagai pungutan pajak, termasuk penduduk etnis Cina. Kemungkinan pengaturan semacam ini telah berlangsung pada tahun-tahun

sebelumnya ketika beberapa komunitas masyarakat tambang yang berhenti dan membentuk perkampungan di luar kompleks pertambangan. Dalam *Staatsblad no. 247 ten tweede sub I h* tahun 1935, menyebutkan pengangkatan kepala etnis Cina yang bertugas sebagai penerjemah dan penghubung pemerintah Belanda serta pengumpul pajak dari kelompok penduduk etnis tersebut. Demikian juga penduduk etnis lainnya di beberapa kampung-kampung di luar kompleks BPM/Shell dengan mengangkat kepala kampung sebagai petugas pajak tanah dan orang. Kepala kampung ini disebut sebagai pembekal. Pembekal ini tidak mendapatkan gaji bulanan hanya diberikan uang pembekal 75 Sen dan mendapatkan 8% dari hasil pajak tanah yang dikumpulkan.

Ketika pembuatan jalan untuk kepentingan penduduk non tambang mulai dikerjakan, pemerintah Asisten Residen juga mengenakan pajak perorangan bagi penduduk non tambang. Jalan dimaksud seperti pembuatan jalan poros dari Pelabuhan Lingkas-Juata (sekarang Jl. Yos Sudarso) dan jalan dari Simpang Tiga ke Pasar Kampung Baru (sekarang Jl. Jend. Sudirman). Pelunasan pajak perorangan bagi penduduk non tambang dapat dilakukan dengan cara bekerja sebagai pembuat jalan. Umumnya diberi tugas sebagai pekerja pemecah batu. Pekerjaan ini juga tetap dikontrol oleh kepala kampung masing-masing.

